

# AGAMA DAN PROBLEM SOSIAL EKONOMI: TELAAH TEOLOGI KEBANGSAAN ATAS GAGASAN REVOLUSI MENTAL UNTUK PERUBAHAN PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN

Salamuddin<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sumatera Utara

Email: [salamuddineste@gmail.com](mailto:salamuddineste@gmail.com)

## *Abstrak*

*Tulisan ini ingin mengurai bagaimana agama sebagai sebuah entitas hidup dalam masyarakat bersentuhan dengan masalah sosial ekonomi. Agama memuat nilai-nilai atau ajaran luhur tentang kehidupan sosial. Nilai tersebut diinterpretasikan oleh tokoh agama sebagai pemegang amanah untuk menterjemahkan ajaran-ajaran agama agar terkontekstualisasikan serta terimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Gagasan revolusi mental yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo menemukan titik persinggungan dengan pesan moral-etik keagamaan untuk melakukan gerakan perubahan serta menjawab problem sosial ekonomi masyarakat. Poin pentingnya adalah bagaimana nilai agama mampu menjawab problematika umat, dan salah satu solusinya adalah mengembalikan peran nilai agama dan tokoh agama dalam gerakan revolusi mental untuk pembangunan yang berkeadilan melalui berbagai strategi gerakan, baik struktural maupun kultural.*

**Kata Kunci:** Agama, Sosial, Revolusi Mental, Teologi Kebangsaan, dan Pembangunan

## *Abstract*

*This article aims to explain how religion as a living entity in the society is connected to socio-economic issues. Religion contains the noble values of social life. These values are then interpreted by religious figures as the conduits for translating religious values into practical application, to be contextualized and implemented in everyday life. The concept of mental revolution launched by President Joko Widodo finds a point of intersection with religious moral-ethical messages facilitating the movements for social change and addressing society's socio-economic challenges. The important point is how religious values are able to answer the problems of the people. The solution is to restore the role of religious values and figures in the mental revolution movement for equitable development, employing various movement strategies, both structural and cultural.*

**Keyword:** Religion, Social, Mental Revolution, National Theology, and Development

## **A. Pendahuluan**

Sepanjang sejarah peradaban manusia pembahasan ‘keyakinan’ dalam hal ini agama<sup>1</sup> selalu menjadi bagian integral yang hampir tidak dapat dipisahkan. Sejarah Asia tidak dapa

---

<sup>1</sup> Durkheim menjelaskan bahwa agama adalah sistem kepercayaan dan amalan yang bersepadu yang berkaitan dengan benda-benda yang kudus, yaitu benda-benda yang diasingkan dan dianggap mempunyai kuasa yang dapat menyatukan semua ahli masyarakat ke dalam suatu komuniti moral atau gereja. Berasaskan definisi ini agama dianggap sebagai sesuatu yang kolektif dan secara nyata adalah produk sosial yang bertujuan untuk mempersatukan ahli masyarakat ke dalam suatu komuniti moral. Di dalam ajaran agama ada yang kudus (sacret) dan ada yang profane. Kudus disucikan dan dianggap sebagai ekspresi simbolik dari realitas sosial, kemudian

dilepaskan dari sejarah agama-agama besar yang hari ini ada di dunia. Sulit memisahkan orang Asia dengan agama. Sekali pun sekularistik mencengkram banyak sendi-sendi kehidupan masyarakat Asia. Tapi agama tetap hidup bahkan dibutuhkan dalam momen-momen tertentu. Watak religiusitas ini menjadikan peran agama dalam banyak sendi kehidupan memiliki ruang tersendiri.

Mengabaikan agama dalam menelisis, membincangkan, mengkaji masyarakat maka menghilangkan satu entitas penting yang seharusnya menjadi satu kajian tersendiri dalam bab ‘konstruksi sosial’ bagaimana masyarakat itu menjalani kehidupannya. Agama mau tidak mau, suka tidak suka karena sifatnya yang terintegrasi dalam rutinitas masyarakat maka ia menjadi bagian penting bagaimana agama menjadi sumber laku hidup, cara pandang dan bahkan menentukan bagaimana kehidupan seseorang itu berjalan. Bahkan di era yang hari ini disebut dengan era teknologi ‘agama’ terkesan termarginalkan namun faktanya tetap menjadi kajian yang ‘seksi’ untuk terus menemukan relevansinya dalam perbincangan sejarah peradaban manusia.<sup>2</sup>

Setiap agama selalu memiliki nilai-nilai agung, ajaran yang dipahami oleh penganutnya, implikasi dari apa yang dipahami menjelma menjadi perilaku masyarakat. Nilai-nilai agama tersebut di gali dan diinterpretasikan oleh tidak semua orang yang beragama, melainkan oleh mereka yang ahli atau memahami secara mendalam tentang ajaran agama yang sering di sebut dengan tokoh agama. Kemana biduk agama ini akan diarahkan dalam sejarah perjalanan agama sangat ditentukan oleh tokoh-tokoh yang berperan sebagai ‘wakil Tuhan’ di bumi.

Nilai agama dan tokoh agama adalah dua entitas yang tak terpisahkan satu sama lain. Bagaimana nilai agama itu dipahami, disebarluaskan dan kemudian diamalkan oleh penganut agama terletak pada bagaimana nilai ajaran agama itu diwacanakan, didiskusikan oleh para tokoh agama. Cara pandang tokoh agama terhadap nilai agama yang sering dikhotbahkan, tema-tema yang didengungkan, diseminarkan dan diceramahkan juga turut andil membentuk diskursus paham keagamaan di level penganut agama. Jika tema yang sering disuarakan adalah

---

memiliki suatu kualitas transendental, sedangkan profane adalah kebalikan dari sakral yaitu sesuatu yang biasa saja. Emile Durkheim. *The Elementary Forms of The Religious Life*. Terj. Joseph Ward Swain. London: George Allen & Unwin. hlm.47.

Geertz menyatakan bahwa agama adalah (1) sistem yang terdiri dari berbagai simbol yang bertindak untuk (2) mewujudkan dalam diri manusia suatu perasaan dan ransangan yang kuat, menyeluruh dan berkepanjangan melalui (3) pembentukan kesadaran terhadap kewujudan satu bentuk aturan umum yang tertib dan terarur yang berkaitan dengan kehidupan, serta (4) menyelubungi kesadaran tersebut dengan satu bentuk aura yang kelihatan betul-betul berwujud, (5) perasaan dan ransangan tersebut seolah-olah mempunyai kebenaran yang sangat unik dan istimewa. Clifford Geertz. *Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books, 1973. Inc., hlm.90.

Koentjaraningrat adalah seorang antropologis terkenal di Indonesia. Karya karyanyanya banyak dijadikan rujukan. Koentjaraningrat dalam melihat agama menegaskan bahwa ada lima komponen agama, antara lain: (1) emosi keagamaan; (2) sistem keyakinan; (3) sistem ritus dan upacara; (4) peralatan ritus dan upacara; (5) umat agama. Koentjaraningrat. *Sejarah Teori Antropologi I*. Universitas Indonesia Press, 1987, Jakarta., hlm. 80.

<sup>2</sup> Tanpa disadari proses marginalisasi agama dengan tidak menyatakan dibuang, menimbulkan krisis spiritualitas, Krisis ini ditandai dengan hilangnya pegangan hidup, makna yang terdalam dan nilai yang mampu menjawab kegelisahan manusia menghadapi orientasi hidup yang serba pragmatis menjadikan manusia tak pernah puas dengan segala yang dicapai, lihat misalnya penjelasan Danah Zohar dan Ian Marshal “*krisis Makna*” dalam *SQ: Kecerdasan Spiritual*, terj. Rahmani Astuti dkk, (Bandung: Mizan Pustaka, 2007) hlm. 16-3. krisis ini ditandai dengan cara pandang dan paradigma ‘manusia modern’ dalam mendefinisikan hidup yang berorientasi pada pemenuhan materil. Akibat dari fenomena di atas, masyarakat modern, yang sering digolongkan *the post industrial society*, suatu masyarakat yang telah mencapai tingkat kemakmuran materi sedemikian rupa dengan perangkat teknologi yang serba mekanis, bukannya semakin mendekati kebahagiaan hidup, melainkan sebaliknya, kian dihindangi rasa cemas justru akibat kemewahan hidup yang diraihinya. Mereka telah menjadi pemuja ilmu dan teknologi, sehingga tanpa disadari integritas kemanusiaannya tereduksi, lalu terperangkap pada jaringan sistem rasionalitas teknologi yang sangat tidak *human*. Lihat: Suryo Adi Sahfutra, *Krisis Manusia Modern, (Kecerdasan Spiritual Sebagai Tawaran Jalan Baru Menuju Tuhan)*, 2012. Paper tidak diterbitkan.

tema tentang perdebatan teologis misalnya, atau berputar-putar pada pusaran *khilafiyah* (perbedaan tokoh agama dalam memahami ajaran agama) maka jangan heran jika penganut agama juga akan ‘terjebak’ pada wacana dan isu-isu yang sama.

Diskursus keagamaan yang sehat di era yang serba tergelobalkan, batas antara ‘*the others*’ tidak lagi tersekat oleh jarak, agama dan ideologi serta semakin jelas masalah utama bagi negara-negara berkembang, maka ketika agama menjadi bagian integral sebuah masyarakat maka agama melalui tokoh-tokoh agamanya juga harus mampu mendorong percepatan pembangunan, perbaikan ekonomi, masalah lingkungan, isu-isu sosial-politik serta banyak hal lain yang membutuhkan daya dorong dari sisi keagamaan.

Revolusi mental yang digelorakan oleh Joko Widodo Presiden republik Indonesia harus ditopang oleh pembangunan mentalitas masyarakat yang kuat, nilai-nilai agama dan apa yang dipahami oleh tokoh agama harus menjadi daya dobrak, pendorong dan inspirasi utama perubahan mentalitas tersebut. Orientasi ekonomi masyarakat yang pragmatis dan terjebak pada cara pandang *matrealisme an sich* harus di rubah agar ruh ‘revolusi mental’ tidak kehilangan arah pada aspek ekonomi maka re-orientasi ekonomi menjadi sebuah keharusan.

Nilai agama tentang aspek ekonomi yang bercorak ‘progresif’ serta meniupkan ruh kompetitif yang sehat, mendorong dan melegetimasi ‘kreativitas’ yang bernilai ekonomis harus menjadi tema utama di khutbah-khutbah, seminar dan perbincangan keagamaan. Secara langsung pesan yang ditebarkan oleh tokoh agama adalah semangat memperbaiki kehidupan dengan pembangunan ekonomi, gairah pembangunan ekonomi digelorakan dengan legetimasi doktrin agama, bahwa agama sangat mendorong bahkan mewajibkan untuk maju dalam bidang ekonomi. Secara tidak langsung hal ini juga akan menggeser perdebatan dan diskursus keagamaan yang selama ini memenuhi wacana keagamaan yang melulu berpusar pada wilayah teologis, khilafiyah, dan hal-hal yang cenderung hitam-putih, salah-benar serta kampanye kebencian atas nama agama.<sup>3</sup>

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka. Sumber kepustakaan penelitian ini adalah buku, jurnal dan laporan penelitian yang didapatkan secara online dan versi cetak. Informasi yang didapatkan dari sumber kepustakaan kemudian direkonstruksi dan disajikan untuk mengulas tujuan penelitian. Dalam kerangka berfikir penelitian ini, Nilai agama yang inklusif (terbuka) atas banyak perubahan seiring terus Bergeraknya dinamika kehidupan harus menjadi alternatif pilihan tokoh agama, sementara nilai agama yang eksklusif terhadap perubahan cara pandang tentang ekonomi harus di reinterpretasikan kembali agar menumbuhkan semangat untuk perbaikan pembangunan ekonomi umat.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

---

<sup>3</sup> Lihat misalnya dalam satu dekade terakhir, diskursus keagamaan di Indonesia khususnya Islam sebagai agama mayoritas lebih di dominasi oleh persoalan khilafiyah, perdebatan teologis, kampanye kebencian antar mazhab serta diskursus hitam-putih. Puncaknya aksi kekerasan, diskriminasi serta terror atas nama agama. Setara Institute. “Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia: Berpihak dan Bertindak Intoleran”, (Intoleransi Masyarakat dan Restriksi Negara dalam Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia). Jakarta: *Publikasi Setara Institute*, 2008. Hlm. 79-81. Dalam agama Islam yang pernah dianggap sesat karena tidak sama dengan mayoritas diantaranya adalah Jemaat Ahmadiyah, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, Al Arqom, kasus Alqiyadah Al Islamiyah (Pimpinan Ahmad Moshaddeq), Salamullah (Pimpinan Lia Eden), Tarekat Wahidiyah (Tasikmalaya), Satariyah (Medan) dan lain-lain. Saksi Yehova pernah dilarang, karena dianggap sesat oleh kalangan gereja dan pada masa Gus Dur larangan tersebut dicabut. Uli Parulian, Uli Parulian Sihombing Dkk, *Menggugat BAKORPAKEM Kajian Hukum Terhadap Pengawasan Agama dan Kepercayaan di Indonesia*, Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), 2008, hlm. 4.

## Jalan Revolusi Mental

Perubahan dunia selalu dimulai dengan dua bentuk jalan, yaitu evolusi dan revolusi. Kedua jalan tersebut memiliki implikasi pada tataran mikro dan makro baik secara sosiologis, ekonomi dan politik. Evolusi dan revolusi memiliki jalannya masing-masing tergantung pada tipologi masyarakat dan sosial-power yang mengiringi perubahan yang terjadi. Pada kasus revolusi selalu disertai oleh perubahan-perubahan fundamental, drastis dan fantastis diberbagai elemen dan bidang kehidupan. Bahkan tidak jarang perubahan dengan jalur revolusi senantiasa melahirkan ‘tumbal’ sebagai sebuah konsekwensi yang muncul atas dasar perubahan yang revolusioner.

Revolusi dalam perspektif Maxisme misalnya menjadi titik pergerakan ketika ketidakadilan, dehumanisasi kaum marginal, buruh, pekerja yang disebut dengan kaum proletar tidak mendapatkan hak-haknya dari kaum borjuis yang mengeksploitasi tenaga dan moda produksi secara kapitalistik. Revolusi juga merupakan bagian dari proses perubahan sosial yang dinamis serta memiliki implikasi yang jauh terhadap pergerseran tata-nilai dalam sebuah masyarakat. Secara konseptual, diakui atau tidak, revolusi sering dipahami sebagai: proses untuk mewujudkan terjadinya transformasi structural dan cultural secara cepat, radikal, dan total di tengah-tengah masyarakat yang tertindas, baik dalam tataran politik maupun social. Yang *mainstream* utamanya adanya perubahan struktur feudal-kolonial menjadi struktur demokratis.<sup>4</sup>

Revolusi mental<sup>5</sup> yang menjadi jargon Presiden Joko Widodo dalam salah satu visi pembangunan indonesia jika ditelisik dari sejarahnya merupakan istilah yang sudah digunakan lebih dahulu oleh beberapa tokoh sejarah dunia. Jika dirunut catatan sejarah memberikan informasi bahwa kata revolusi dengan makna yang mengikutinya dimulai dari revolusi Inggris yang melahirkan ‘magna carta’ (piagam besar) yang membatasi absolutisme kerajaan inggris pada tahun 1215. Revolusi Amerika tahun 1776 yang menghasilkan “Declaration of Independence”. Kemudian disusul revolusi Prancis tahun 1789 yang mendeklarasikan semboyan Liberté, Egalité, Frternité.<sup>6</sup>

Secara khusus istilah revolusi pernah dimunculkan dalam sejarah indonesia pertama, oleh Tan Malaka melalui bukunya yang berjudul *Naar de ‘Republiek Indonesia’* (Menuju Republik Indonesia) yang diterbitkan pada tahun 1925. Makna revolusi Tan tertuang dalam salah satu isi pidatonya:

*“Revolusi Indonesia tiadalah akan semata-mata untuk menukar kekuasaan Belanda dengan kekuasaan bumi putera (Peperangan Kemerdekaan bangsa), tetapi juga untuk menukar kekuasaan hartawan Belanda dengan Buruh Indonesia (putaran-sosial). Jadi pergerakan kita sekarang, ialah nasionalis sosial, dan berpadanan dengan itu perkakas bertarung ialah perkakas militer (Karim-isme)*

---

<sup>4</sup> Sartono Kartodirdjo, “Beberapa Perspektif dalam Studi Revolusi Prancis dan Revolusi Indonesia”, dalam Henri Chambert Loir dan Hasan Muarif Ambariy (ed) *Panggung Sejarah* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), hlm. 106.

<sup>5</sup> Kemunculan istilah revolusi mental pertama kali didengungkan oleh Frederick W. Taylor (*The Principles of Scientific Management*, 1911) istilah ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana terjadinya perubahan radikal, pola pikir untuk mengatasi masalah inefisiensi perusahaan melalui penerapan manajemen ilmiah. Ini mencakup perubahan pola pikir terkait hubungan kerja (“saling-berhadapan” menjadi “saling-tergantung”), landasan kerja (“opini subyektif” menjadi “sains obyektif”), etos kerja (“kepentingan pribadi” menjadi “kepentingan bersama”), dan penguasaan surplus (“akumulasi” menjadi “distribusi”). Penerapan manajemen ilmiah itu secara luas disebut Taylorisme atau Gerakan Efisiensi. Argumentasi lain menyebutkan istilah revolusi mental berasal dari Kalr marx dalam *The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte* (*Die Revolution*, New York, 1852)

<sup>6</sup> Lihat misalnya: Julian Hoppit, "The Nation, the State, and the First Industrial Revolution," *Journal of British Studies* (April 2011). Hlm. 307-331.

*bercampur dengan perkakas ekonomi dan politik, yakni mogok, boikot dan demonstrasi”<sup>7</sup>*

Tan Malaka mencoba memahami Revolusi dalam pengertian perlawanan secara fisik, melalui berbagai aksi yang dapat menggulingkan sebuah kekuasaan, bagi Tan jalur diplomasi adalah bentuk basa-basi yang ujungnya tetap saja tidak dapat memenuhi tujuan dari revolusi itu sendiri. Tokoh ke dua, yang populer dengan jargon revolusi adalah Presiden Indonesia pertama Soekarno. Revolusi bagi Soekarno berbeda dengan apa yang dipahami oleh Tan Malaka, baginya revolusi memiliki jalan yang bertahap, jalan kehormatan memperjuangkan kepentingan rakyat bukan dengan jalan pertumpahan darah semata melainkan melangkah lebih jauh dari itu untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Bung Karno kemudian membagi tingkatan-tingkatan revolusi. Tahun 1945-1955, menurutnya, adalah tingkat *physical revolution*. Dalam tingkatan ini Indonesia berada dalam fase merebut dan mempertahankan proklamasi kemerdekaan dari tangan imperialis dengan mengorbankan darah. Periode 1945-1950 adalah periode revolusi fisik. Lalu tahun 1950-1955 merupakan tahun-tahun untuk bertahan hidup atau tingkatan survival. Survival berarti tetap hidup, tidak mati. Walaupun mengalami lima tahun revolusi fisik (*physical revolution*), Indonesia tetap berdiri. Karena itu, tahun 1950-1955 adalah tahun penyembuhan luka-luka, tahun untuk menebus segala penderitaan yang dialami dalam revolusi fisik. Tahun 1956 adalah periode revolusi sosial-ekonomi untuk mencapai tujuan terakhir revolusi yaitu suatu masyarakat yang adil makmur “tata-tentrem-karta-raharja”.<sup>8</sup> Tepatnya, periode tahun 1955-sekarang (dan seterusnya) adalah periode *investment*, yaitu *investment of human skill, material investment, mental investment*. Investmen-tinvestment itu semuanya adalah untuk *socialist construction* yaitu untuk amanat penderitaan rakyat.<sup>9</sup>

Merujuk revolusi mental yang digunakan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pengertiannya lebih sederhana. Dapat dipahami bahwa gelisahan dan latarbelakang yang menjadikan jargon revolusi mental itu muncul adalah sebuah realitas masyarakat yang menurut Joko Widodo mengalami kemunduran yang luar biasa, khususnya dalam bidang kepribadian. Beberapa paragraf dalam tulisan yang dimuat harian Kompas atas nama Joko Widodo menjelaskan:

*“Ekonomi semakin berkembang dan masyarakat banyak yang bertambah makmur. Bank Dunia bulan Mei ini mengatakan ekonomi Indonesia sudah masuk 10 besar dunia, jauh lebih awal dari perkiraan pemerintah SBY yang memprediksi baru terjadi tahun 2025. Di bidang politik, masyarakat sudah banyak menikmati kebebasan serta hak-haknya dibandingkan sebelumnya, termasuk di antaranya melakukan pergantian pemimpinnya secara periodik melalui pemilu yang demokratis. Namun, di sisi lain, kita melihat dan merasakan kegalauan masyarakat seperti yang dapat kita saksikan melalui protes di jalan-jalan di kota besar dan kecil dan juga di ruang publik lainnya, termasuk media massa dan media sosial. Gejala apa ini? Pemimpin nasional dan pemikir di Indonesia bingung menjelaskan fenomena bagaimana keresahan dan kemarahan masyarakat justru merebak. Sementara, oleh dunia, Indonesia dijadikan model keberhasilan reformasi yang*

---

<sup>7</sup> Tan Malaka, *Naar de “Republiek Indonesia” (Menuju Republik Indonesia)*, Yayasan Massa, 1987, hlm.19. lihat juga: Tan Malaka, *Semangat Muda*, Ted Sprague (Mei 2007), hlm. 31.

<sup>8</sup> Wawan Tunggal Alam, *Demi Bangraku Pertentangan Sukarno Vs. Hatta*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 461-462.

<sup>9</sup> Departemen Penerangan RI, *Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi dengan Tambahan Re-So-Pim Tahun Kemenangan Genta Suara Revolusi*, Surabaya: Pertjetakan Negara dan Pers Nasional, 1963, hlm. 158. Tunggal Alam, op cit, hlm. 462.

*menghantarkan kebebasan politik serta demokrasi bersama pembangunan ekonomi bagi masyarakatnya”.*<sup>10</sup>

Berdasarkan argumentasi yang di bangun dalam potongan kalimat di atas menjelaskan bahwa revolusi mental yang dimaksud Jokowi adalah perubahan mendasar dan fundamental dalam sikap, cara berpikir dan tindakan. Revolusi mental yang di gagas oleh Jokowi menjadi visi besar dalam pembangunan manusia indonesia dalam program pemerintahannya.

Program Revolusi mental Jokowi berbeda dengan revolusi lainnya, sebut misalnya revolusi Rusia yang memilih jalan revolusi dengan melakukan pergantian rezim, sistem dan struktur dan tatanan sosial ekonomi. Ada tiga hal utama yang menyebabkan terjadinya Revolusi Rusia, yaitu: 1) Ketidakmampuan para aparat pemerintah pusat *the old regime*; 2) meluasnya pemberontakan kelas bawah; 3) upaya pemimpin politik yang memobilisasi masa untuk mengkonsolidasikan negara revolusioner.<sup>11</sup> Revolusi adalah suatu tindakan dari suatu bagian penduduk untuk memaksakan kehendaknya pada pihak lain dengan jalan kekerasan. Bila si pemenang menghendaki keberhasilan perjuangannya, maka ia harus mempertahankan kekuasaannya dengan jalan terror yang dihadapkan oleh alat senjatanya terhadap golongan reaksioner. Dengan kata lain penguasa dalam revolusi boleh berbuat apa saja, pihak lawan atau yang tidak setuju dianggap sebagai golongan reaksioner atau pun sebagai golongan kontra revolusioner.<sup>12</sup> Itulah sebabnya, produk revolusionernya adalah munculnya negara bangsa yang sentralistis birokratis dan bersifat inkorporasi massa dengan meningkatkan kekuasaan yang lebih besar di tingkat internasional.

Kekuasaan politik yang dimiliki rezim memang memiliki kehendak untuk bertindak secara tegas atas pilihan jalan politiknya dalam mengaktualisasikan visinya, kekuasaan politik juga merupakan sebagian dari kekuasaan sosial yang fokusnya ditujukan kepada negara sebagai satu-satunya pihak yang berwenang yang mempunyai “hak” untuk mengendalikan tingkah laku sosial dengan paksaan.<sup>13</sup>

Bangsa indonesia memiliki sejarah revolusi, salah satu yang populer dalam sejarah adalah revolusi fisik<sup>14</sup> yaitu fase perjuangan untuk keluar dari cengkraman penjajahan. Fase ini melibatkan banyak kalangan khususnya pemuda sebagai penggerak revolusi yang sangat kuat, dalam beberapa catatan konflik fisik pemuda selalu menjadi terdepan, bahkan strategi-strategi baru muncul dari kalangan pemuda dalam pengoprasikan revolusi.<sup>15</sup>

Jokowi menginginkan adanya perubahan mentalitas masyarakat yang menurutnya telah mengalami disorientasi hidup, kehilangan pegangan dari tradisi, serta etos kerja dan semangat pembangunan yang rendah. Jika diamati dengan seksama problematika sosial masyarakat maka revolusi mental memiliki peran penting dalam memberikan solusi alternatif bagi terlaksananya perubahan yang turut serta ikut dalam pembangunan.

Argumentasi yang dibangun dan disebarluaskan melalui media Massa cetak tersebut setidaknya ingin mengawali diskursus yang lebih tajam agar mendapatkan respon dari berbagai kalangan. Perlu dipahami bahwa gagasan revolusi mental yang oleh atas nama Joko Widodo

---

<sup>10</sup> Joko Widodo, Kolom Opini, *Koran* harian Kompas, Sabtu 10 Mei 2014.

<sup>11</sup> Theda Skocpol, *Negara dan Revolusi Sosial Suatu Analisis Komparatif tentang Prancis, Rusia, dan Cina*, (Jakarta: Erlangga, 1991). hlm. 36-37.

<sup>12</sup> Deliar Noor, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm. 169.

<sup>13</sup> Tentang penggunaan dan pengembangan kekuasaan militer, polisi, atau kekuasaan kriminal dengan kontrol yang sangat kuat terhadap kekerasan merupakan hal utama. Baca: Soerjono Soekanto, *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali, 1983). hlm. 275.

<sup>14</sup> Revolusi fisik merupakan suatu bentuk perjuangan yang dilakukan dengan menciptakan konflik, pertempuran dan peperangan fisik. Perlawanan terhadap penjajah dari fase Belanda, Jepang merupakan rangkain revolusi fisik yang dilakukan bangsa Indonesia. Mohammad Sidki Daeng Materu, *Sejarah Pergerakan Nasional Bangsa Indonesia*, (Jakarta: Gunung Agung, 1985), hlm. 5-7.

<sup>15</sup> Adam Malik, *Mengabdikan Republik* (Jakarta: Gunung Agung, 1984), cetakan ke-2 angkatan 45, hlm. 63.

dalam tulisan tersebut ingin menawarkan solusi perubahan secara gradual tapi juga revolusioner dalam pengertian strategis, implementatif dan efisien baik waktu maupun sumberdaya yang digunakan untuk menggerakkan revolusi mental. Gagasan tersebut berbeda dengan revolusi yang pernah didengungkan oleh tokoh-tokoh nasional Indonesia terdahulu.

Tanggapan paling populer dalam mendukung argumentasi yang dibangun dalam tulisan revolusi mental Joko Widodo muncul dari kalangan akademisi Karina Supelli yang mencoba memberikan pemahaman secara lebih mendalam terkait makna revolusi mental, Karlina memulai dengan memberikan definisi mental secara terminologi yaitu, sebagai "...nama bagi genangan segala sesuatu menyangkut cara hidup."<sup>16</sup> Di dalam cara hidup itu ada cara berpikir, cara memandang masalah, cara merasa, mempercayai/meyakini, cara berperilaku dan bertindak. Karena itu, menurut Karlina istilah "mental" tidak hanya menyangkut urusan bathin, tetapi juga berkenaan dengan hal-hal yang bersifat ragawi. Esensi pemahaman yang sama namun diungkapkan dalam nalar yang terbalik disimpulkan oleh seorang psikolog Amerika, Gordon W. Allport, sebagaimana dijelaskan Ignas Kleden, bahwa kepribadian atau personaliti tak hanya mencakup aspek-aspek eksternal, tetapi juga mengandung hal-hal yang intrinsik.<sup>17</sup> Karena itu, menurut Allport kepribadian adalah organisasi dinamis dalam diri seorang individu (yang mengatur) sistem-sistem psikofisis serta menentukan perilaku dan pikiran yang karakteristik.

Argumentasi lain di tulis oleh Agus Sutisna<sup>18</sup> dengan judul 'Landasan Ontologis Revolusi Mental' menguraikan dengan panjang lebar bahwa Apapun kecenderungan dan ruanglingkup pemaknaan yang digunakan; apakah ia merujuk hanya pada dimensi bathin atau watak manusia sebagaimana lazimnya difahami secara umum selama ini, atau sebagai satu kesatuan utuh antara dimensi bathin dan ragawi manusia seperti dikemukakan Supelli, istilah "mental" dalam phrasa "Revolusi Mental" Jokowi tidak bisa lain, kecuali harus dipijakkan pada nilai-nilai Pancasila. Sebab hakikat mental adalah menyangkut soal watak-bathin, mindset, karakter dan kepribadian. Dan kepribadian bangsa Indonesia tidak berada di dunia antah berantah. Ia ada di dalam memori kesadaran kolektif bangsa ini, yang sudah berbilang abad hidup dan tumbuh berkembang dalam kehidupan keseharian dan disepakati sebagai sebuah konsensus kebangsaan : Pancasila.

### **Revolusi Mental sebagai Gerakan Perubahan Sosial Ekonomi**

Masyarakat dalam perspektif sosiologis dipahami sebagai sebuah komunitas yang dinamis, perubahan-perubahan terjadi akibat dari struktur sosial yang terus bergerak seiring terjadinya kontak dan pertemuan dari berbagai entitas masyarakat yang berbeda. Era *borderless society* yang ditandai dengan hilangnya sekat-sekat pembatas antar komunitas, hilangnya jarak demografis seiring kemajuan teknologi dan informasi menjadikan daya sentuh dan intensitas pertukaran informasi begitu cepat menjadikan revolusi perubahan sosial sulit dihindari.

Perubahan sosial bagi Emile Durkheim dipahami sebagai akibat dari terjadinya klasifikasi sosial di masyarakat, menguatnya solidaritas sosial yang disesuaikan dengan kondisi demografis serta tantangan-tantangan yang dihadapi. Perubahan tersebut bisa dari tradisionalisme mekanistik ke modernis-organisatoris (Lauer, 1982: Samuel, 2010). Perubahan sosial merupakan gejala alamiah dalam proses kehidupan, bahkan dalam dunia saintifik modern Fritjof Capra dengan tegas mengatakan bahwa perubahan sosial akibat dampak dari modernisme mengalami masalah multidimensional (Capra: 1982).

---

<sup>16</sup> Karlina Supelli, "Arti Revolusi Mental", dalam laman Bayt al Hikmah Institute, <https://ahmadsamantho.wordpress.com/2014/07/04/mengartikan-revolusi-mental/> 30 Juni 2015.

<sup>17</sup> Ignas Kleden, "Menerapkan Revolusi Mental", Kolom Opini, *Koran* harian Kompas, 25 September 2014.

<sup>18</sup> AgusSutisna: [https://www.academia.edu/8922897/landasan\\_ontologis\\_revolusi\\_mental\\_sang\\_presiden/](https://www.academia.edu/8922897/landasan_ontologis_revolusi_mental_sang_presiden/) 30 Juni 2015.

Secara lebih jelas Supardi Suparlan menguraikan bahwa perubahan sosial selalu terjadi pada wilayah struktur dan sistem sosial yang berkaitan dengan masalah hubungan keluarga, masyarakat, kebudayaan, sistem sosial-politik dan lebih jauh kependudukan (Suparlan:1997). Watak perubahan sosial yang alamiah ini menentukan bagaimana bentuk dan wajah masyarakat, dalam pendekatan teori perubahan sosial perspektif teori konflik menjelaskan bahwa konflik adalah sumberdaya perubahan, karena dalam konflik selalu memunculkan dinamisasi konsensus dan integrasi yang juga berdampak pada perubahan sistem sosial yang ada (Ritzer: 1997). Kondisi konflikual yang bersifat manifest dan berkelanjutan dalam masyarakat mengindikasikan perubahan itu dilalui dengan 'culture shock', oleh karena itu perubahan sudah semestinya diiringi oleh rekaya sosial yang tersistematis dan gradual.

Perubahan dalam struktur sosial yang sistematis dan gradual harus didukung oleh infrastruktur politik, ekonomi dan kondisi sosial-budaya yang terintegrasi. Dukungan perubahan itu di desain agar tidak bertabrakan dengan sistem sosial dan norma masyarakat untuk menghindari tidak terjadinya konflik manifest yang merusak tatanan arah perubahan yang ingin dicapai. Dalam hal menggerakkan dan mendisain perubahan tersebut peran pemerintah sangat diharapkan mampu memberikan tawaran kebijakan serta desain yang tepat sesuai dengan konteks masyarakat.

Soejono Soekanto, dengan mengutip penjelasan dari beberapa ahli, menjelaskan terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan baik dalam ukuran yang paling kecil yaitu perilaku kita ataupun dalam ukuran yang lebih luas yaitu struktur dan budaya masyarakat kita. Tetapi secara garis besar faktor-faktor tersebut dapat dibedakan sebagai sumber perubahan sosial yang berasal dari dalam masyarakat atau internal (*endogenous*) dan dari luar masyarakat itu sendiri atau eksternal (*exogenous*).<sup>19</sup>

Desain arah perubahan sosial yang bertujuan untuk mensejahterakan dan memakmurkan masyarakat Indonesia, pemerintah mencanangkan gerakan revolusi mental untuk perubahan sosial. Salah satu tujuan dan gagasan revolusi mental untuk menjawab kegelisahan sosial yang sedang dihadapi oleh masyarakat Indonesia seperti tertuang dalam landasan berpikir gerakan revolusi mental yang dicanangkan oleh presiden Joko Widodo melalui program Nawacita.

Gagasan Revolusi Mental untuk perubahan sosial tersebut merupakan gerakan kolektif yang melibatkan seluruh bangsa dilaksanakan melalui internalisasi nilai-nilai esensial pada individu, keluarga, insititusi sosial, masyarakat sampai dengan lembaga-lembaga negara. Nilai-nilai esensial tersebut meliputi etos kemajuan, etika kerja, motivasi berprestasi, disiplin, taat hukum dan aturan, berpandangan optimistis, produktif-inovatif adaptif, kerja sama dan gotong royong, dan berorientasi pada keadilan publik dan kemaslahatan umum. Adapun untuk mencapai Indonesia yang maju, makmur dan sejahtera serta mandiri diperlukan manusia-manusia unggul dengan pendidikan yang baik, memiliki keahlian dan keterampilan, menguasai teknologi, pekerja keras, mempunyai etos kemajuan; selalu bersikap optimistik dalam menatap masa depan; dan memiliki nilai-nilai luhur yaitu gotong royong, toleransi, solidaritas, rukun dan saling menghargai dan menghormati.

Perubahan melalui jalan revolusi mental dalam ranah sosial akan memiliki dampak terhadap pembangunan ekonomi. Gagasan revolusi mental adalah jalan cepat menuju perubahan mentalitas masyarakat baik secara individu maupun secara kolektif, struktural maupun kultural. Perubahan harus dipahami sebagaimana sifatnya yang naturalistik bahwa segala sesuatunya dinamis dan terus bergerak, masalahnya adalah bagaimana perubahan itu

---

<sup>19</sup> *Endogenous* dipahami sebagai faktor internal meliputi perubahan kependudukan yang tidak hanya berkaitan dengan angka populasi melainkan kompleksitas masyarakat, distribusi kebutuhan, struktur sosial dan variasi tingkat status sosial masyarakat, temuan, inovasi dan konflikualisme. *Exogenous* dipahami sebagai faktor eksternal meliputi kultur dan lingkungan. Lihat lebih lengkap: Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990), hlm. 317-325.

dimaknai dan dibangun apakah kemunduran atau kemajuan yang membawa manfaat bagi publik.

Perubahan sosial budaya dan ekonomi masyarakat terjadi seiring dengan perubahan dan pengembangan dunia ke depan. Perubahan akan terus terjadi karena hanya dengan perubahan sebuah kelompok masyarakat dapat terus ada. Perubahan kearah yang lebih baik dengan apik dijelaskan oleh Inglehart '*deep-rooted change in mass worldview are reshaping economic political and social life*'.<sup>20</sup> Hal ini dimungkinkan terjadinya perubahan dalam bidang sosial, politik dan ekonomi kearah yang lebih baik.

Tilaar menjelaskan agak panjang lebar terkait perubahan di suatu masyarakat, sosiologi misalnya selalu memberikan pusat perhatian pada perubahan sosial (*social change*) sehingga memunculkan teori tersendiri terkait kajian masyarakat.<sup>21</sup> Lebih lanjut Tilaar mengemukakan bahwa perubahan di masyarakat disebabkan oleh tiga hal diantaranya yaitu; kebutuhan akan demokratisasi, kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, dan globalisasi.<sup>22</sup> Kebutuhan demokrasi mengharuskan terjadinya pergeseran nilai, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mengubah perilaku dan gaya hidup serta cara pandang terhadap kehidupan yang berbeda dari sebelumnya serta globalisasi yang menghubungkan jarak semakin dekat dan meruntuhkan sekat-sekat pembatas sosial.

Philip H. Phenix dengan jernih menguraikan '*social change can be analyzed in terms of the concept of structure, function and social needs. While no exact laws of social behavior have yet been formulated, some insight may be gained into the basis for individual conformity and derivation and for the transformation that take place in cultures, institutions, norms, roles and rankings as a result of internal stresses, environmental factors, or external pressures*'.<sup>23</sup> Faktor yang paling signifikan terhadap jalannya perubahan bagi masyarakat seperti Indonesia ditentukan oleh ke tiga hal seperti yang diuraikan oleh Tilaar dan dikuatkan oleh Phenix.

### **Nilai Agama, Tokoh Agama dan Gerakan Revolusi Mental**

Kajian tentang peran nilai agama dan tokoh agama yang mendorong terjadinya revolusi mental untuk reorientasi pembangunan ekonomi dalam konteks masyarakat beragama di Indonesia memiliki beberapa kajian konseptual. Konseptualisasi nilai yang dimaksudkan agar mampu menjadi dasar bagaimana penggalian dan interpretasi nilai agama yang mendorong reorientasi pembangunan ekonomi dapat dirumuskan. Diantara beberapa kata kunci dan kajian konseptual tersebut antara lain:

#### **a. Dari Literal-Skriptural ke Kontekstual**

Cara pandang tokoh agama dalam memahami nilai-nilai agama dapat digolongkan dalam dua bentuk, yaitu literal-skriptural dan kontekstual.<sup>24</sup> Cara pandang ini berimplikasi pada

---

<sup>20</sup> Ronald Inglehart, *Modernization and Postmodernizations: Cultural, Economic and Political Change in 43 Societies*, (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1997), hlm. 3.

<sup>21</sup> H.A.R. Tilaar *Perubahan sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif Untuk Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm. 3.

<sup>22</sup> H.A.R. Tilaar *Perubahan Sosial*...hlm. 22.

<sup>23</sup> Philip H. Phenix, *Realms of Meaning: A Philosophy of The Curriculum for General Education*, (New York: McGraw-Hill Book Company, 1994), hlm. 131.

<sup>24</sup> Dalam kehidupan sosial keagamaan, jika seseorang dan lebih-lebih kelompok telah terpaku kuat pada pemahaman kitab suci secara literal-skriptural, maka tiga kata kunci sosial mendadak hilang yaitu "kompromi", "konsensus" dan "negosiasi" hilang, lebih-lebih kosa kata "kritik" tenggelam dalam pelukan hegemoni kekuasaan tafsir kepentingan individu, kelompok (partai, agama, suku, ras, organisasi keagamaan). Kompromi dan konsensus adalah kata kunci penting bagi masyarakat yang hidup di era kemajemukan, multireligius dan multikultural. Oleh karena desakan kebutuhan untuk memperteguh identitas diri dan kelompok, pemahaman keagamaan yang bersifat skriptural-literal yang mudah dan cepat dapat dipegangi, maka dua kata kunci sosiologis secara mudah diplesetkan arti dan maknanya menjadi "kemunafikan", ketidakkonsistenan, kelemahan iman dan pada puncaknya "kekafiran". Betapa bedanya pandangan teologis dan pandangan sosiologis dalam hal ini. Sudah barang tentu, model pendekatan teologis yang bercorak literal-skriptural dapat membantu mengantarkan pada

bagaimana nilai agama atau ajaran agama dipahami kemudian dikembangkan dan disampaikan kepada umat. Corak interpretasi ini sangat rigid dan kaku, sulit menerima hal-hal baru, statis dan tidak memiliki peluang untuk terjadinya pembaharuan atas dinamika yang dihadapi oleh umat.

b. Inklusivisme: dari *co-existence* ke *pro-existence*

Cara pandang inklusivisme adalah bentuk cara pandang terbuka atas hal-hal baru dengan tetap berpegang teguh pada tradisi atau nilai yang ada di agama. Artinya corak pemikiran ini akan siap dengan hal-hal terbaru yang ditemukan kemudian merumuskan pendasarannya pada nilai keagamaan. *Co-existence* adalah cara pandang bahwa keberadaan satu kelompok mengakui kelompok lain yang berbeda, pengakuan ini sepenuhnya adalah bagian dari kesadaran bahwa orang lain memiliki hak yang sama untuk berada dengan segala bentuk identitas kulturalnya. Dari sikap yang inklusif ini memunculkan sikap menerima kehadiran pihak lain menuju *pro-existence* yaitu sikap mau dan bersedia membangun kerjasama satu sama lain meskipun memiliki perbedaan. Dasar pijakan ini sangat dibutuhkan untuk terjadinya saling interkoneksi dan integrasi dalam konteks masyarakat majemuk.<sup>25</sup>

c. *Sifthing Paradigm*: Menembus Batas eksklusivitas

Watak keberagamaan yang eksklusif akan sulit menerima perubahan dan masukan serta kritik dari pihak luar, pola pemikiran yang satu arah serta akan menolak semua hal yang dianggap baru. Hal yang demikian harus ditembus oleh tokoh agama dengan memunculkan interpretasi baru tentang makna dan nilai keagamaan agar terjadi *sifthing paradigm*, yaitu pergeseran paradigma, pergeseran ini cukup penting mengingat ketidakmungkinan sebuah komunitas atau cara pandang yang eksklusif.

Ketiga kata kunci konseptual di atas adalah kerangka awal untuk bisa dilakukannya revolusi mental terhadap cara pandang keagamaan yang dinamis dan progresif, tanpa adanya pola pikir yang futuristik yang dimiliki oleh tokoh agama maka sulit merubah kebiasaan dan cara berpikir umat yang cenderung berkutat pada wilayah hitam putih, salah-benar dan selalu membahas hal-hal yang sifatnya transcendental.

### **Reposisi Pemikiran Tokoh Agama: Menuju Revolusi Mental dan Reorientasi Pembangunan Ekonomi Ummat**

Dari sini, kira-kira satu abad yang lalu ahli psikologi agama, William James membuat kategori keberagamaan yang sehat (*Healthy minded*) dan keberagamaan yang sakit (*sick soul*). Tanda-tanda keberagamaan yang “sehat” antara lain mempunyai sikap dan pandangan dunia (*world view*) yang *optimistik* (penuh harapan, besar hati, berpandangan luas, melihat dunia tidak selebar daun kelor), *extrovert* (terbuka, luwes bergaul dengan siapa saja, memiliki sense of humor tidak suka menyembunyikan perasaan jengkel dan beban berat, persahabatan luas tanpa sekat-sekat primordialisme) dan *gradual* (selalu sabar, lebih menekankan proses yang

---

posisi penguatan, penegasan dan penguatan identitas diri dan kelompok secara umat, tetapi pada saat yang sama pemahaman tersebut juga mengindikasikan betapa “miskin” dan “rapuh”nya corak pemahaman seperti itu terhadap keberadaan orang lain (the others). Posisi dan pemahaman seperti itu tidak hanya terbatas pada golongan umat beragama tetapi juga pada kelompok-kelompok lain yang non-agama. Boleh dibalang bahwa konsekwensi yang tak diharapkan dari corak pemahaman literal-skriptural terhadap kitab suci adalah lemahnya pandangan seorang dan kelompok agamawan terhadap keberadaan kelompok lain diluar diri dan kelompoknya. Jangankan memikirkan proexistence dengan orang kelompok lain, pada tingkat coexistence saja amat sulit diperoleh. Lihat Amin Abdullah, “Dilema Antar Konservasi Nilai Tradisi Keislaman dan Penyebaran Etos Perdamaian: Pemimpin Agama memerlukan Kemampuan dua bahasa” dalam *Fenomena Konflik Sosial di Indonesia*, Lemlit UIN Sunan Kalijaga, 2005, hlm. 21-42.

<sup>25</sup> Nurcholish Madjid, *Fiqih Lintas Agama: Pembangun masyarakat Inklusif Pluralis*, Jakarta: Paramadina, 2004.

bertahap dan berkesinambungan tidak instant dalam mencapai cita-cita, termasuk kebaikan). Sedangkan ciri keberagamaan yang “sakit” antara lain adalah pandangan dunia (world view untuk tidak menyebutnya belief, aqidah, credo, dogma) yang bercorak *pesimistik* (kecil hati, tidak punya harapan masa depan yang cerah dan baik, tidak begitu menggembirakan, berwajah muram-murung), *introvert* (tertutup, tidak banyak bicara, tidak humoris, tidak mudah bergaul, persahabatan dan pergaulan hanya terbatas pada kelompok sendiri) dan *non-gradual* (jika ingin punya cepat tercapai, tidak sabar, instant, tidak memperhatikan proses panjang yang harus dilalui jika mempunyai cita-cita atau keinginan).<sup>26</sup>

Kondisi keberagamaan yang coba di urai oleh William di atas dengan pembagian dua tipe model sebenarnya ini menjelaskan bagaimana tipe orang beragama. Revolusi mental di telisik dari aspek keagamaan untuk penguatan reorientasi pembangunan ekonomi harus memperhatikan dua tipe tersebut. Tipe manusia yang beragama yang sehat akan lebih mudah di arahkan pada hal-hal yang sifatnya perjuangan, pembangunan serta komitmen untuk terus berubah ke arah yang lebih baik.

Watak manusia beragama yang sudah bergeser pada pemenuhan materialisme semata sebagai bentuk satu-satunya keberhasilan tanpa memahami bahwa orientasi ekonomi bukanlah semata-mata terkait dengan pemenuhan materi belaka. Hal ini untuk menghindari bentuk-bentuk eksploitasi sumberdaya alam dan manusia yang tidak mempertimbangkan aspek-aspek spiritual, apa yang terjadi hari ini seperti eksploitasi alam yang sewenang-wenang, krisis lingkungan, krisis sosial akibat dari ketimpangan ekonomi menunjukkan bahwa nilai agama terabaikan.

Reorientasi pembangun ekonomi dan peran tokoh agama harus memperhatikan hal tersebut. Sehingga tugas manusia sebagai makhluk sosial, wakil Tuhan di bumi tidak menjadi boomerang bagi manusia lainnya. Cara pandang tokoh agama juga harus reposisi terkait pilihan-pilihan mana yang harus di kembangkan dan diberikan ke ummat dalam setiap khotbah, seminar dan ceramah-ceramah keagamaan.

masyarakat beragama yang tidak agresif biasanya dikondisikan oleh corak dan model pendidikan agama (*learning system*) yang ditawarkan oleh para pimpinan agama, masyarakat, atau kelompok agama yang santun secara sosial. Para guru dan pemimpinnya memang selalu mempromosikan dan menyemaikan nilai-nilai perdamaian pada umatnya, sedangkan masyarakat beragama yang agresif biasanya memang dibentuk oleh corak pemahaman keagamaan para elit pemimpinnya (guru, mentor, dosen, kiai, pastur, romo, pendeta, tokoh agama) yang berubah dan menjelma menjadi ”ideologi” pembela kepentingan tertentu.

Pimpinan elit agama termasuk didalamnya guru, orang tua, dosen, kyai, da’i, ustadz, pimpinan gerakan mahasiswa, pimpinan organisasi sosial keagamaan, dan pimpinan politik yang berbasis agama, pimpinan usrah, halaqah, tarbiyah dan sejenisnya ternyata memegang kunci penting kemana layar akan berkembang, dan kemana biduk doktrin agama akan dibawa. Ke arah konsensus dan kompromi yang mengarah ke kesejukan dan perdamaian, atau ke arah pertentangan, mutual distrust, konflik dan kekerasan. Pada dasarnya agama bersikap mendua (ambivalent) bisa sejuk, bisa juga beringas; bisa lunak, bisa keras; bisa damai, bisa juga perang. Karena sifatnya yang mendua, lalu para elit pimpinan agama perlu ekstra hati-hati dan benar-benar waspada. Tingkah laku, akhlak sosial-politik, solah bowo, muna-muni (bahasa Jawa), dan fatwa-fatwa keagamaan, yang dikeluarkan oleh pemimpin agama akan sangat membentuk corak perilaku agresif atau non-agresif dari umatnya. Termasuk yang perlu diwaspadai adalah bagaimana corak pendidikan agama yang diberikan sejak dari pilihan materi, metode, sampai teknik pengajaran di sekolah-sekolah umum, pesantren, sekolah-sekolah agama, perguruan tinggi, gerakan mahasiswa, kursus-kursus ”kilat” keagamaan, model penjangkaran anggota baru

---

<sup>26</sup> Lihat lebih lengkap William James, *The Varieties of Religious Experience: A Study in Human Nature*, New York: New American Library, 1958.

lewat gerakan dan pemahaman keagamaan, majelis-majelis taklim, arena serta tempat-tempat kebaktian, rapat-rapat, dan pidato-pidato keagamaan yang bersifat agitatif di tempat-tempat umum, seperti di lapangan terbuka, masjid, pura, gereja dan begitu seterusnya.

#### **D. Simpulan**

Peran nilai-nilai agama dan tokoh agama dalam gerakan Revolusi mental untuk reorientasi pembangunan ekonomi harus dimulai dari penggeseran tema-tema khutbah, ceramah, dan muatan nilai keagamaan yang disampaikan oleh kalangan agamawan atau tokoh agama melalui mimbar-mimbar agama. Spirit kebangkitan ekonomi berbasis religiusitas akan memberikan perspektif baru bagi umat bahwa perjuangan pembangunan ekonomi tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan materialistik saja, melainkan lebih dari itu menjalankan tugas manusia sebagai makhluk wakil Tuhan yang bertugas menjaga dan menggunakan kekuatannya untuk mengabdikan kepada Tuhan.

Nilai agama yang progresif, optimistik, serta menumbuhkan semangat juang untuk kebangkitan ekonomi harus semakin sering didengungkan, dikembangkan, digali dan terus menjadi pilihan tema-tema pembicaraan tokoh agama. Rumah ibadah harus direposisi tidak hanya sebagai tempat untuk membicarakan masalah-masalah ibadah melainkan bisa saja menjadi 'rumah ibadah produktif' yang menggerakkan ekonomi umat. Panggung atau mimbar-mimbar agama harus menelurkan serta menyebarkan virus energi semangat perubahan cara pandang terhadap pembangunan ekonomi.

Dari cara pandang keagamaan yang kontekstual, inklusif serta adanya *sifting paradigm* dalam memahami nilai-nilai agama yang mendorong ijtihad-ijtihad baru dikalangan agamawan akan menjadi bagian penting dalam proses gerakan revolusi mental yang didengungkan oleh negara serta memberikan kontribusi agama bagi perbaikan kondisi masyarakat. Bahwa agama cenderung mengurus soal ibadah vertikal serta cenderung menutup diri pada perubahan akan secara perlahan dapat dihindari.

#### **Referensi**

- Adam Malik, *Mengabdikan Republik*, Jakarta: Gunung Agung, 1984
- Amin Abdullah, "Dilema Antar Konservasi Nilai Tradisi Keislaman dan Penyebaran Etos Perdamaian: Pemimpin Agama memerlukan Kemampuan dua bahasa" dalam *Fenomena Konflik Sosial di Indonesia*, Lemlit UIN Sunan Kalijaga, 2005
- AgusSutisna: [https://www.academia.edu/8922897/landasan\\_ontologis\\_revolusi\\_mental\\_sang\\_presiden](https://www.academia.edu/8922897/landasan_ontologis_revolusi_mental_sang_presiden) / 30 Juni 2015.
- Clifford Geertz. *Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books, 1973
- Deliar Noor, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, (Jakarta: Rajawali, 1982
- Departemen Penerangan RI, *Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi dengan Tambahan Re-So-Pim Tahun Kemenangan Genta Suara Revolusi*, Surabaya: Pertjetakan Negara dan Pers Nasional, 1963
- Danah Zohar dan Ian Marshal "krisis Makna" dalam *SQ: Kecerdasan Spiritual*, terj. Rahmani Astuti dkk, Bandung: Mizan Pustaka, 2007
- Emile Durkheim. *The Elementary Forms of The Religious Life*. Terj. Joseph Ward Swain. London: George Allen & Unwin
- H.A.R. Tilaar *Perubahan sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif Untuk Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 2002
- Ignas Kleden, "Menerapkan Revolusi Mental", Kolom Opini, *Koran* harian Kompas, 25 September 2014.
- Joko Widodo, Kolom Opini, *Koran* harian Kompas, Sabtu 10 Mei 2014
- Koentjarningrat. *Sejarah Teori Antropologi I*. Universitas Indonesia Press, 1987, Jakarta

- Karlina Supelli, "Arti Revolusi Mental", dalam laman Bayt al Hikmah Institute, <https://ahmadsamantho.wordpress.com/2014/07/04/mengartikan-revolusi-mental/> 30 Juni 2015.
- Nurcholish Madjid, *Fiqih Lintas Agama: Pembangun masyarakat Inklusif Pluralis*, Jakarta: Paramadina, 2004
- Ronald Inglehart, *Modernization and Postmodernizations: Cultural, Economic and Political Change in 43 Societies*, Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1997
- Philip H. Phenix, *Realms of Meaning: A Philosophy of The Curriculum for General Education*, New York: McGraw-Hill Book Company, 1994
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*, Jakarta: Rajawali, 1983
- Sartono Kartodirdjo, "Beberapa Perspektif dalam Studi Revolusi Prancis dan Revolusi Indonesia", dalam Henri Chambert Loir dan Hasan Muarif Ambary (ed) *Panggung Sejarah* (Jakarta: Julian Hoppit, "The Nation, the State, and the First Industrial Revolution," *Journal of British Studies* 2011
- Mohammad Sidki Daeng Materu, *Sejarah Pergerakan Nasional Bangsa Indonesia*, Jakarta: Gunung Agung, 1985
- Theda Skocpol, *Negara dan Revolusi Sosial Suatu Analisis Komparatif tentang Prancis, Rusia, dan Cina*, Jakarta: Erlangga, 1991
- Uli Parulian Sihombing Dkk, *Menggugat BAKORPAKEM Kajian Hukum Terhadap Pengawasan Agama dan Kepercayaan di Indonesia*, Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), 2008
- Tan Malaka, *Naar de "Republiek Indonesia" (Menuju Republik Indonesia)*, Yayasan Massa, 1987,
- William James, *The Varieties of Religions Experience: A Study in Human Nature*, New York: New American Library, 1958
- wan Tunggul Alam, *Demi Bangraku Pertentangan Sukarno Vs. Hatta*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003